

**WUJUDKAN
PENDIDIKAN GRATIS,
ILMAH DAN
DEMOKRATIS UNTUK
SELURUH RAKYAT
INDONESIA**

1+4 Tuntutan LMND



PENDIDIKAN ADALAH HAK RAKYAT, BUKAN PERSOALAN KEMAMPUAN EKONOMI

Kalau pendidikan memang hak setiap warga negara, lalu mengapa kemampuan ekonomi masih menjadi salah satu penentu apakah seseorang bisa mendapatkan pendidikan tinggi atau tidak? Pertanyaan ini bukan hanya persoalan mahasiswa yang mengeluh karena UKT mahal tetapi di balik angka UKT terdapat persoalan yang jauh lebih besar, yaitu tentang siapa yang bertanggung jawab membiayai pendidikan, bagaimana negara mengelola anggaran pendidikan, dan sejauh mana negara benar-benar menjamin hak rakyat untuk memperoleh pendidikan.

Setiap tahun kita menyaksikan persoalan yang hampir sama. Ada calon mahasiswa yang harus mengurungkan niat kuliah karena biaya. Ada mahasiswa yang harus bekerja sambil kuliah. Ada orang tua yang terpaksa berutang agar anaknya tetap bisa melanjutkan pendidikan. Ada pula mahasiswa yang harus memilih antara membayar kebutuhan hidup atau membayar biaya kuliah. Persoalan tersebut kemudian sering dipersempit menjadi persoalan UKT. Padahal, UKT hanyalah salah satu bagian dari sistem pembiayaan pendidikan tinggi.

UKT DAN PERSOALAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI

Sistem UKT pada dasarnya dibangun dengan gagasan bahwa biaya pendidikan tinggi dihitung berdasarkan Biaya Kuliah Tunggal, sementara sebagian biaya ditanggung oleh pemerintah dan sebagian lainnya dibebankan kepada mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi. Dengan demikian, sejak awal sebenarnya sudah terdapat pengakuan bahwa pendidikan tinggi bukan semata-mata urusan mahasiswa dan keluarganya, melainkan juga merupakan tanggung jawab negara. Namun pertanyaannya kemudian kemudian, apakah sistem yang masih menjadikan mahasiswa sebagai salah satu sumber pembiayaan pendidikan sudah cukup untuk memastikan setiap rakyat dapat memperoleh pendidikan tinggi? Karena itu, rencana tentang pendidikan gratis menjadi sesuatu yang penting untuk kita dorong dan segera dilaksanakan.

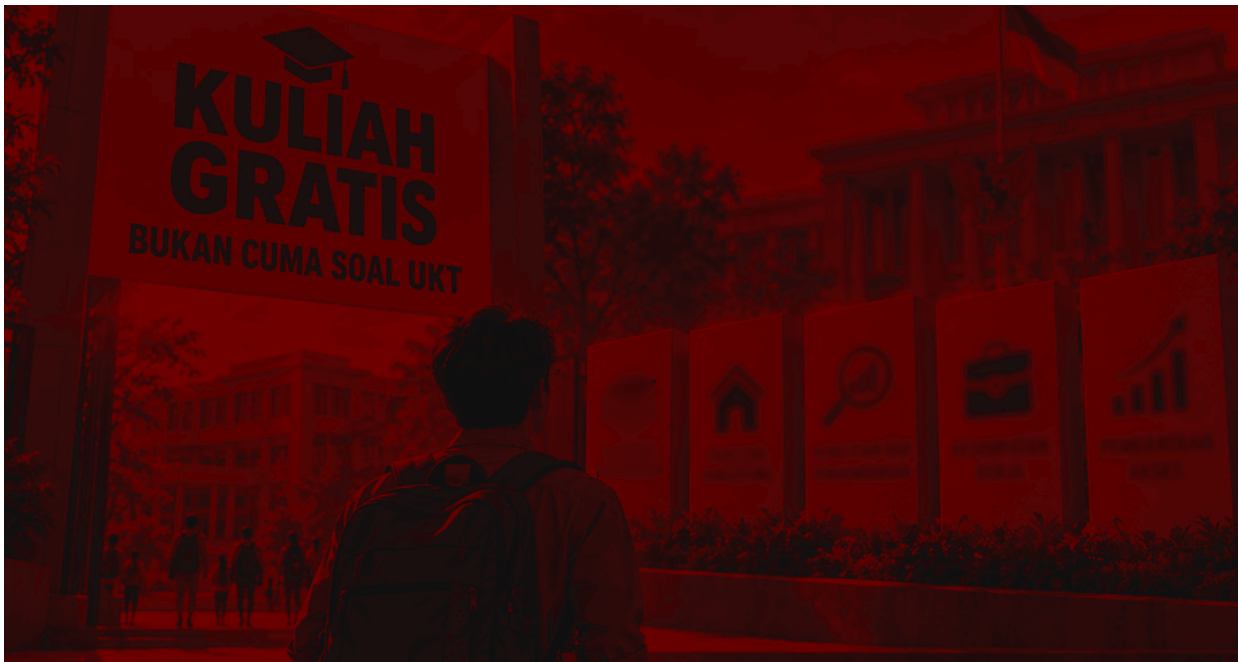


PENDIDIKAN GRATIS BUKAN SEKADAR MENGHAPUS UKT

Pendidikan gratis tidak boleh dipahami hanya sebagai menghapus UKT. Pendidikan gratis harus dipahami sebagai perubahan mendasar dalam tanggung jawab pembiayaan pendidikan. Negara harus memastikan biaya penyelenggaraan pendidikan tersedia melalui anggaran publik sehingga warga negara tidak terhalang memperoleh pendidikan hanya karena tidak mampu membayar.

Tetapi pendidikan gratis juga tidak boleh berarti pendidikan murahan. Kuliah dengan biaya Rp0 tetapi gedungnya tidak layak, laboratorium tidak tersedia, dosen tidak sejahtera, penelitian tidak berkembang, fasilitas tidak merata, dan kebebasan akademik tidak terjamin tentu bukan cita-cita pendidikan yang kita perjuangkan.

Karena itu, pendidikan gratis yang diperjuangkan harus berjalan bersama pendidikan yang ilmiah, demokratis, bermutu, dan merata.



PENDIDIKAN GRATIS SEBAGAI JALAN MENUJU KEADILAN SOSIAL

Guru dan dosen harus sejahtera. Fasilitas pendidikan harus diperbaiki. Kampus di daerah harus memiliki kesempatan berkembang. Mahasiswa dari keluarga miskin harus memperoleh akses yang sama. Anak petani, buruh, nelayan, pekerja informal, dan masyarakat di daerah terpencil harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan bermutu seperti anak dari keluarga yang secara ekonomi lebih mampu. Inilah yang membuat pendidikan gratis bukan hanya persoalan isu biaya kuliah. Tetapi lebih pada persoalan keadilan sosial.

DARI GAGASAN MENUJU KEBIJAKAN: MOMENTUM PENDIDIKAN GRATIS



Momentum hari ini menjadi penting karena gagasan tersebut mulai bergerak dari perdebatan normatif menuju pembicaraan kebijakan yang lebih konkret. Pemerintah telah menyampaikan rencana untuk memperluas pendidikan gratis dan sedang mematangkan kebijakan pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah. Pada saat yang sama, pemerintah mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk mewujudkannya. Untuk pendidikan tinggi negeri, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp93,7 triliun untuk membebaskan biaya kuliah sekitar 2,83 juta mahasiswa D3, D4, dan S1 di PTN. Angka tersebut penting bukan karena Rp93,7 triliun adalah angka kecil. Justru karena angka itu besar, maka mahasiswa harus mendorong agar pembahasannya dilakukan secara terbuka dan rasional.

APBN 2026 mengalokasikan sekitar Rp769,1 triliun untuk anggaran pendidikan, sesuai amanat 20 persen anggaran negara. Untuk RAPBN 2027, pemerintah merancang anggaran pendidikan sekitar Rp. 824 triliun.

Artinya, negara memang telah menyediakan sumber daya yang sangat besar untuk sektor pendidikan.

SD, SMP, SMA
UNIVERSITAS NEGERI
HARUS GRATIS

MENATA ULANG ANGGARAN PENDIDIKAN UNTUK MENJAMIN PENDIDIKAN GRATIS

Kalau pemerintah serius ingin mewujudkan pendidikan gratis, maka pembahasannya tidak cukup berhenti pada pernyataan bahwa anggaran pendidikan 2027 mencapai Rp820,9 triliun. Angka sebesar itu harus kita lihat lagi secara lebih rinci, digunakan untuk apa, siapa yang menerima, dan seberapa besar yang benar-benar langsung membiayai kebutuhan pendidikan peserta didik.

Karena itu, dalam pembahasan APBN 2027, pemerintah dan DPR perlu melakukan penghitungan ulang serta evaluasi terhadap seluruh pos anggaran pendidikan. Program yang memang penting tetap harus berjalan, tetapi ruang realokasi perlu dibuka untuk memperbesar pembiayaan yang secara langsung mendukung pendidikan gratis.

Rp. 824 triliun bukan angka kecil. Persoalannya sekarang bukan sekadar menambah anggaran, tetapi memastikan anggaran sebesar itu disusun dengan prioritas yang tepat.

PEMULIHAN ASET KORUPSI UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT

Yang tidak kalah penting, seperti yang disinggung oleh Presiden, bahwa pemerintah akan memanfaatkan pemulihan dan memaksimalkan penyitaan aset korupsi.

Kalau kita ingin pendidikan gratis benar-benar terwujud, selain dari penghitungan ulang dan realokasi dana pendidikan tahun 2027, Kita juga perlu melihat bagaimana negara mengembalikan uang rakyat yang hilang karena korupsi. Datanya menunjukkan masalah ini bukan masalah kecil. ICW mencatat potensi kerugian negara dari perkara korupsi yang ditangani aparat mencapai sekitar Rp42,7 triliun pada 2022, sekitar Rp28,4 triliun pada 2023, dan melonjak menjadi sekitar Rp330,9 triliun pada 2024. Memasuki 2025, Kejaksaan Agung melaporkan bahwa kerugian negara yang terimplikasi dalam perkara korupsi dan TPPU yang mereka tangani mencapai sekitar Rp300,86 triliun. Dari proses tersebut, sekitar Rp24,71 triliun berhasil diselamatkan.

Angka-angka ini tentu tidak boleh langsung dianggap sebagai uang yang seluruhnya bisa masuk ke kas negara. Ada proses hukum, pembuktian, penyitaan, perampasan, dan eksekusi yang harus dilalui. Tetapi justru di situlah pekerjaan besar negara. ICW mencatat bahwa sepanjang 2019–2023, dari sekitar Rp234,8 triliun kerugian negara akibat korupsi, yang berhasil dirampas kembali hanya sekitar Rp32,8 triliun atau 13,9 persen.

Artinya, kemampuan negara untuk mengejar dan mengembalikan aset hasil korupsi masih punya ruang yang sangat besar untuk diperkuat.

Dan kalau aset itu berhasil dipulihkan, manfaatnya jangan berhenti sebagai angka dalam laporan penegakan hukum.

MEMPERKUAT RUANG FISKAL UNTUK PENDIDIKAN RAKYAT

Kita bisa mendorong agar pemulihan aset tersebut menjadi salah satu sumber tambahan untuk memperkuat pembiayaan kebutuhan rakyat, termasuk untuk pendidikan gratis.

Bukan berarti pendidikan gratis hanya dibiayai dari uang hasil korupsi. APBN tetap menjadi sumber utama. Tetapi semakin banyak aset negara yang berhasil dipulihkan, semakin besar pula ruang fiskal yang bisa digunakan untuk kepentingan publik.

PENDIDIKAN GRATIS SEBAGAI AMANAT KONSTITUSI

Pembukaan UUD 1945 menempatkan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat (4) juga menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Dengan demikian, sebetulnya perjuangan akan pendidikan gratis bukan hanya soal tuntutan ekonomi mahasiswa saja, tetapi juga adalah bagian dari perjuangan untuk menjalankan mandat konstitusi.

Pendidikan adalah hak warga negara dan negara memiliki tanggung jawab untuk menjaminkannya. Karena itu, ketika seorang anak tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keluarganya tidak mampu membayar, persoalannya tidak cukup dijawab dengan hanya memberikan beasiswa. Beasiswa memang penting.

Tetapi beasiswa tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban atas persoalan struktural akses pendidikan. Hak atas pendidikan harus juga dijamin melalui sistem yang memungkinkan rakyat memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi.

PERUBAHAN REGULASI SEBAGAI FONDASI PENDIDIKAN GRATIS

Dalam kerangka inilah juga perubahan regulasi menjadi penting. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lahir dalam konteks sistem pendidikan yang masih memberikan ruang besar bagi pembiayaan pendidikan oleh peserta didik. Kalau negara ingin benar-benar bergerak menuju pendidikan gratis yang menjamin akses pendidikan bagi seluruh rakyat, tentu dibutuhkan dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Karena itu, pembahasan RUU Sisdiknas menjadi momentum yang penting. Bagi kita, ini tidak boleh dilihat hanya sekedar urusan DPR dan pemerintah, tetapi ini adalah juga menyangkut bagaimana wajah pendidikan Indonesia ke depan. Oleh sebab itu, kita perlu ikut mengawal agar pendidikan gratis bukan hanya menjadi slogan. Regulasi yang baru harus benar-benar memastikan biaya pendidikan gratis, memperhatikan kesejahteraan guru dan dosen, memperluas pemerataan fasilitas, menjaga kebebasan akademik, serta memastikan anggaran pendidikan dikelola secara transparan dan tepat sasaran.

PENDIDIKAN GRATIS, ILMIAH, DEMOKRATIS, BERMUTU, DAN MERATA

Karena itu, pendidikan gratis harus diletakkan dalam satu kesatuan dengan mutu, pemerataan, kesejahteraan pendidik, kebebasan akademik, dan demokratisasi pendidikan serta kepastian hukum. Pendidikan yang kita perjuangkan bukan hanya pendidikan yang gratis, tetapi pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, bermutu, dan dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi ekonomi maupun geografis.

1+4 TUNTUTAN LMND: PENDIDIKAN GRATIS UNTUK RAKYAT

Atas dasar itulah LMND menyerukan gerakan nasional. Pendidikan gratis untuk rakyat. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis untuk seluruh rakyat Indonesia.

LMND menyambut dan mengawal komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis, termasuk pendidikan tinggi negeri.

Pada saat yang sama, LMND menyampaikan 1+4 tuntutan:

- 1. LMND menyatakan sikap mendukung sekaligus mengawal komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis bagi rakyat, termasuk pendidikan tinggi negeri.**
- 2. LMND mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mencabut atau merevisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, agar kerangka hukum pendidikan nasional benar-benar sejalan dengan agenda pendidikan gratis.**
- 3. LMND mendesak dilakukannya audit dan realokasi anggaran pendidikan 20 persen untuk menjamin pembiayaan pendidikan gratis secara transparan dan akuntabel. Anggaran pendidikan tidak boleh hanya besar secara nominal, tetapi harus jelas penggunaannya dan benar-benar dirasakan oleh rakyat.**
- 4. LMND mendesak peningkatan kesejahteraan guru, dosen, dan seluruh tenaga kependidikan, karena pendidikan gratis dan bermutu tidak mungkin dibangun dengan mengabaikan mereka yang menjalankan proses pendidikan.**
- 5. LMND mendesak pemerintah mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia, baik dari sisi akses, fasilitas, kualitas pembelajaran, riset, teknologi pendidikan, maupun kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.**

MEMBANGUN GERAKAN NASIONAL PENDIDIKAN GRATIS

Inilah 1+4 tuntutan LMND.

Satu sikap untuk menyambut sekaligus mengawal komitmen pendidikan gratis.

Empat desakan untuk memastikan komitmen tersebut diterjemahkan menjadi perubahan hukum, pembiayaan yang transparan, peningkatan kesejahteraan pendidik, serta pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Oleh sebab itu, menjadi momentum untuk LMND memperluas kesadaran dan kekuatan gerakan pendidikan gratis di seluruh Indonesia.

